

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah di Indonesia telah hadir sejak lebih dari lima belas tahun, yakni diawali dengan didirikannya bank Muamalat pada tahun 1992 dan terus berkembang sampai saat ini. Hingga sampai pada Januari 2009, statistik BI menunjukkan bahwa telah terdapat lima Bank Umum Syariah dan 26 Unit Usaha Syariah. Tentunya dalam perjalanannya, bank syariah harus melalui tantangan dan peluang-peluang yang harus dihadapi guna mencapai target tingkat pertumbuhan yang telah ditetapkan, terutama berkaitan dengan kondisi internal dan eksternal dari bank syariah. Maka peluang dan tantangan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pertumbuhan bank syariah itu sendiri.

Berkaitan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bank syariah, jika ditinjau dari fakta perkembangan bank syariah yang tidak mencapai proyeksi yang telah ditargetkan, memberikan pertanyaan tersendiri dalam usaha pengembangan perbankan syariah. Mengingat potensi penduduk Indonesia yang sangat besar karena Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 207 juta atau sekitar 88 % dari total jumlah penduduk pada tahun 2007. Apalagi sejauh ini peranan bank syariah selalu dinilai baik, salah satu indikatornya tingkat FDR rata-rata yang mendekati 100%. Namun, perbankan syariah di Indonesia masih belum mampu menjadi pilihan utama penduduk di Indonesia. Jika

dibandingkan dengan Malaysia, dengan jumlah penduduk Muslim sebesar 24,8 juta pada tahun 2007, perkembangan perekonomian syariah di Malaysia jauh meninggalkan Indonesia. Muhri Fauzi Hafiz (2008) dalam artikelnya menyebutkan bahwa “berdasarkan pangsa perbankan syariah di Malaysia terhadap perbankan konvensional telah mencapai angka 53,68% pada tahun 2007”.

Beberapa fakta yang dapat menggambarkan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia selama ini, yaitu pada tahun 2005, pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional sebesar 1,40% sedangkan target proyeksi yaitu 1,85%. Pada tahun 2006 pangsa bank syariah hanya mencapai 1,58% padahal proyeksi target yaitu sebesar 2,79%. Pada tahun 2007, Bank Indonesia menetapkan target pencapaian pangsa sebesar 3,94%. Namun, target tersebut tidak tercapai karena pangsa bank syariah pada tahun 2007 hanya mencapai 1,84%. Begitupun pada tahun 2008, dimana pencapaian pangsa bank syariah hanya sebesar 2,2%, padahal Bank Indonesia menargetkan pangsa bank syariah sebesar 5%.

Tabel 1.1
Proyeksi Pertumbuhan Aset dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah

year	projected asset	expected real growth	expected asset size per office	expected branch operating	expected growth of convention all banking	share to total national banking industry
2003	7,860	90%	31.3	251	1142.2	0.68%
2004	14,148	80%	43.9	322	1216.4	1.15%
2005	24,052	70%	54.9	437.9	1277.3	1.85%
2006	38,483	60%	68.7	560.5	1341.1	2.79%
2007	57,724	50%	85.8	672.6	1408.2	3.94%
2008	80,813	40%	107.3	753.4	1478.6	5.18%
2009	107,078	33%	134.1	798.6	1552.5	6.45%

2010	135,453	27%	167.6	808.1	1630.1	7.67%
2011	171,348	27%	209.5	817.8	1711.7	9.10%

Sumber : Laporan Perbankan Syariah 2004, Januari 2005.

Jika ditinjau dari segi persaingan, untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkannya, sebagai lembaga *intermediary* yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bank syariah tidak hanya berhadapan dengan bank-bank yang ada pada industri perbankan syariah sendiri, tetapi juga harus berhadapan dengan bank-bank konvensional yang menganut konsep bunga sebagai daya tarik. Dimana persaingan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi perbankan di tanah air, yang juga ditujukan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi makro ekonomi negara. Karena, sebagai salah satu bagian dari sistem ekonomi makro negara, industri perbankan tidak lepas dari pengaruh kondisi makro ekonomi tersebut. Salah satu kebijakan BI tersebut yaitu mengenai bunga acuan BI atau *BI Rate*. Tingkat suku bunga yang berlaku di dunia usaha maupun tingkat bunga perbankan konvensional mengacu pada tingkat suku bunga Bank Indonesia atau *BI Rate*.

Bank konvensional merespon pergerakan *BI Rate* dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga simpanan dan suku bunga kreditnya. Sementara, margin bagi hasil DPK perbankan syariah tidak demikian karena didasarkan pada performa penyaluran pembiayaan bagi masyarakat. Akibatnya, ketika seluruh bank konvensional menaikkan suku bunganya akibat kenaikan *BI Rate*, dapat

mengakibatkan nasabah lebih memilih menempatkan dana mereka di bank konvensional jika bagi hasil bank syariah tidak dapat mengimbangi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Infobank. Hasil survey oleh Infobank menyatakan bahwa pada saat bagi hasil yang diberikan kepada deposan secara individual relatif sama dengan bulan-bulan sebelumnya, namun sangat kecil dibanding suku bunga pada bank-bank konvensional yang merangkak naik akibat naiknya suku bunga BI, maka melihat perbandingan seperti ini para deposan besar cenderung menarik dananya, sementara deposan kecil tidak demikian.

Menurut Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI, Harisman (pasarmuslim.com : 2006), “peningkatan aset disebabkan meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK)”. Jadi, DPK merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mencapai pangsa bank syariah sesuai target yang telah ditetapkan. Jika terdapat masalah pada dana pihak ketiga bank syariah, maka sangat memungkinkan akan berpengaruh pula pada pencapaian pangsa bank syariah.

Peneliti Senior Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (BI), Ascarya (Republika : 2006) menyatakan:

Penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah tertekan perbankan konvensional. Hal itu dipicu oleh kenaikan suku bunga BI (*BI Rate*) yang mendorong kenaikan suku bunga DPK perbankan konvensional. Sehingga nasabah mengalihkan simpanannya dari bank syariah ke bank konvensional.

Senada dengan pernyataan di atas, Kepala Divisi BII Syariah Chairil A. Azis menyatakan sebagai berikut :

Bank syariah masih bisa berkinerja dengan baik dan mampu bersaing dengan bank konvensional, terutama mengenai bagi hasil jika *BI Rate* rendah. Namun, jika *BI Rate* cenderung naik bahkan melebihi 10 persen, bank syariah tidak akan mampu bersaing karena besarnya biaya dana (*cost of fund*) yang ditanggung. Dengan *cost of fund* yang tinggi, akan sulit bagi bank syariah untuk bersaing. Sebagai langkah antisipasi, bank syariah akan mengucurkan pembiayaan jangka pendek di mana relatif risiko fluktuasi suku bunganya bisa dibatasi.

Dampak dari kenaikan *BI Rate* ini dialami pula oleh bank BRI Syariah. Sebagaimana diungkapkan oleh Pemimpin Cabang BRI Syariah Bandung, Sutrisno (Republika:2006) bahwa :

Nasabah yang loyal pada sistem syariah di tempatnya hanya sekitar 20%. Total DPK BRI Syariah hingga Desember 2005 masih mencapai 40 miliar. Namun, pada posisi April 2006 dana masyarakat tinggal 10 miliar. Sisa dana yang lain telah dialihkan pemiliknya ke lembaga konvensional dikarenakan suku bunga dianggap lebih menguntungkan.

Fenomena pengalihan dana tersebut juga terjadi secara nasional sebagaimana diungkapkan Bank Indonesia dalam Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2006 (BI:2006).

Perkembangan DPK perbankan syariah pada tahun 2006 diwarnai kondisi persaingan penghimpunan semakin ketat pada industri perbankan secara umum. Pertumbuhan DPK perbankan syariah mengalami tekanan dalam kondisi suku bunga yang tinggi di awal 2006, namun seiring penurunan suku bunga sejak semester kedua, DPK yang dihimpun perbankan syariah meningkat secara signifikan sehingga mampu mencapai pertumbuhan 32,7% atau lebih tinggi dari laju pertumbuhan tahun 2005 sebesar 31,4%.

Hal ini sebagian sudah diantisipasi oleh beberapa perbankan syariah, misalnya pada Bank Niaga Syariah yang sudah mengubah tingkat bagi hasil deposito syariahnya (*nisbah*) menjadi 80% untuk deponan dan 20% untuk bank; dari yang semula 60:40. Senada dengan Bank Niaga Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM)

juga telah melakukan hal yang sama. Sehingga nisbah bagi hasilnya setara dengan 8% - 9% per tahun untuk semua nasabah.

Pada tahun 2007, terdapat fenomena penurunan *BI Rate* hingga 8%. Hal ini mengakibatkan bagi hasil perbankan syariah semakin kompetitif. Kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya perpindahan dana nasabah dari bank konvensional ke bank syariah. Seperti disampaikan, Kepala Divisi Syariah Bank Jabar, Suryaman bahwa :

Menurunnya *BI Rate* menyebabkan ekuivalensi bagi hasil deposito perbankan syariah semakin kompetitif. Sebab, perubahan besarnya bunga deposito bank konvensional dipengaruhi perubahan besarnya *BI Rate*. Tetapi *BI Rate* tidak mempengaruhi perubahan ekuivalensi bagi hasil bank syariah.

Namun, secara keseluruhan, penurunan *BI Rate* pada tahun 2007 ini tidak mengantarkan bank syariah pada pertumbuhan dana pihak ketiga sesuai harapan agar dapat mencapai pangsa bank syariah yang telah ditargetkan. Padahal, dengan suku bunga acuan yang lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, seharusnya bank syariah dapat meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga yang lebih besar karena produk bank syariah dinilai lebih kompetitif.

Pada tahun 2008, *BI Rate* kembali berfluktuatif. Sejumlah kalangan mengkhawatirkan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia terancam stagnan atau diam ditempat apabila Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan (*BI Rate*) yang tinggi. Potensi bank syariah untuk menarik dana masyarakat akan menurun akibat tingginya bunga yang ditawarkan bank konvensional.

Dari fenomena-fenomena di atas dapat dilihat bagaimana *BI Rate* mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga bank syariah yang pada akhirnya berdampak pula pada pangsa bank syariah terhadap perbankan nasional. Apalagi bank syariah pada saat ini masih dalam tahap mengembangkan diri agar dapat lebih berkembang dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam industri perbankan sehingga mampu memberikan peranan besar dalam perbaikan kondisi ekonomi di tanah air. Tentunya sangat penting untuk mengidentifikasi hal-hal yang mungkin dapat mendukung dan menghambat pertumbuhan bank syariah itu sendiri baik dari pihak internal maupun eksternal bank syariah. Maka, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **”Pengaruh Pergerakan *BI Rate* Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, walaupun Bank Syariah tidak mengenal konsep bunga, tetapi bank syariah berada pada sistem besar yang telah lama berhubungan erat dengan konsep bunga. *BI Rate* yang dijadikan acuan suku bunga perbankan baik untuk sisi *funding* maupun *lending* dapat berpengaruh terhadap bank syariah khususnya dalam menyikapi kekompetitifan produk syariah dibandingkan produk konvensional yang lebih fleksibel menghadapi perubahan *BI Rate*, khususnya dalam menarik dana masyarakat yang menjadi sumber utama likuiditas dan pendanaan bank, serta usaha dalam pencapaian pangsa bank

syariah sesuai target yang ditetapkan. Dengan demikian dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran pergerakan *BI Rate*.
2. Bagaimanakah gambaran pertumbuhan Dana Pihak Ketiga bank syariah.
3. Bagaimanakah pengaruh pergerakan *BI Rate* terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menyimpulkan tentang pengaruh pergerakan *BI Rate* terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada bank syariah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pergerakan *BI Rate*.
2. Untuk mengetahui gambaran pertumbuhan Dana Pihak Ketiga bank syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pergerakan *BI Rate* terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti dan bagi pihak yang berkepentingan.

1. Akademis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi untuk kajian selanjutnya mengenai masalah yang berkaitan dengan tema ini.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemegang kebijakan yakni pihak Bank Indonesia dan pihak intern manajemen perbankan syariah untuk menentukan kebijakan terbaik dalam menyikapi kondisi eksternal bank syariah khususnya mengenai pergerakan *BI Rate* yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah itu sendiri.